

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdussamad. 2021. *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: CV. Syakir Media Press.
- Asrina. 2017. *Rokok Perilaku & Rasionalitas*. Sulawesi Selatan: Yayasan Inteligencia Indonesia.
- Efendi. 2018. *Istilah Hukum Populer*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Efendi. 2018. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Depok, Jawa Barat: Prenadamedia Group
- Fajar. 2011. *Bahaya Merokok*. Jakarta Timur: Penerbit PT. Sarana Bangun Pustaka.
- Hamzah. 2017. *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Haryoko. 2020. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Makassar: Universitas Negeri Makassar.
- Ishaq. 2017. *Metode Penulisan Hukum dan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*. Bandung: ALFABETA.
- Karim. 2020. *Karakteristik Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Melalui Restorative Justice*. Surabaya: CV. Jakad Media Publishing.
- Mardani. 2024. *Teori Hukum*. Jakarta: Penerbit Kencana.
- Masniati. 2021. *Perilaku Petugas Dalam Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok*. Penerbit NEM.
- Melan. 2023. *Bentuk-Bentuk Penerapan Sanksi Perdata atas Pelanggaran Etik Notaris*. Penerbit NEM.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*, Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press.
- Mutaqin. 2020. *Antikorupsi dan Integritas*. Jawa Barat: CV. MEDIA SAINS INDONESIA.
- Prasetyo. 2011. *Hukum Pidana*. Jakarta. Raja Grafindo.
- Rahim. 2021. *Metodelogi Penelitian Teori dan Praktik*. Tasikmalaya: Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia.

- Redi. 2018. *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. Jakarta Timur: Penerbit Sinar Grafika.
- Rini. 2022. *Analisis Kebiasaan Merokok Dan Status Gizi Pada Remaja*. Jawa Tengah: Penerbit Wawasan Ilmu.
- Rochka. 2019. *Kawasan Tanpa Rokok Di Fasilitas Umum*. Jawa Timur: Uwais Inspirasi Indonesia.
- Rusianto. 2016. *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Penerbit Kencana.
- Safitri. 2019. *MEDIA SMOF VITURING (SMOOKING EFFECT VIDEO AND PICTURE LEARNING) UNTUK PENINGKATAN PEMAHAMAN BAHAYA MEROKOK*. Yogyakarta: Penerbit CV Mine.
- Siregar. 2020. *Suatu Analisis Mengenai Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Elektronik*. Bandung : Penerbit PT. Refika Aditama
- Sukmana. 2012. *Buku Mengenal Rokok dan Bahaya nya*. Surabaya: Program Mitradan Proyek Perpustakaan.
- Sulistyowati. 2011. *Prototype Kawasan Tanpa Rokok*. Kemenkes RI.
- Suryatna. 2001. *Zat Kimia dalam Rokok*. Bandung: Epsilon Grup.
- Soerojo, dkk. 2011. *Pengawasan/Penegakan Hukum Kawasan Tanpa Rokok*, Palembang: TCSC-IAKMI.
- Warsono. 2022. *Metode Pengolahan Data Kualitatif*. Semarang: Program Studi Doktor Administrasi Publik FISIP-UNDIP

Jurnal

- Anjari. (2022). “PENEGAKAN HUKUM TINDAKAN MAIN HAKIM SENDIRI YANG MEMENUHI UNSUR PASAL 170 DAN PASAL 351 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA”. *Jurnal Hukum : Staatsrechts*. Vol. 5 No. 1 (hlm. 3).
- A Tatumpe. (2019). “PENEGAKAN HUKUM DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA RINGAN (TIPIRING) DI INDONESIA”. *Jurnal UNPI MANADO*. Vol. 1 No. 1 (hlm.7).
- Agustina, dkk. (2022). “LITERATURE REVIEW: ANALISIS PELAKSANAAN KEBIJAKAN KAWASAN TANPA ROKOK (KTR) DI FASILITAS

- PELAYANAN KESEHATAN”. *Jurnal : Sosial dan Sains*. Vol. 2 No. 3 (hlm. 14-17).
- Aslamsyah (2023). “PENEGAKAN KAWASAN TANPA ROKOK OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DI KABUPATEN KAPUAS HULU PROVINSI KALIMANTAN BARAT”. *Repository IPDN*. Vol. 2 No. 3 (hlm.17).
- Azurma. (2023). “Faktor - Faktor yang Mempengaruhi Keterlambatan Pembayaran Pajak”. *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*. Vol. 2 No.9 (hlm. 722).
- Badri. (2021). “Efektivitas Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Indonesia Ditinjau dari Perspektif Hukum”. *Jurnal Analisis Hukum*, Vol. 2 No. 2 (hlm 4).
- Dwiyanti. (2021). “Akibat Hukum Tindakan Anarkis Demonstran Terhadap Perusakan Fasilitas Umum”. *Jurnal : Analogi Hukum*, Vol. 3 No. 2 (hlm. 252).
- Firdaus. (2013). “ANTINOMI KEWENANGAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS) DENGAN PENYIDIK POLRI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA TERPADU”. *Jurnal : Dinamika Hukum*, Vo. 13 No. 1 (hlm. 152).
- Ghufran. (2021). “Kajian Terhadap Pengaturan Sanksi Denda Administratif Dalam Peraturan Daerah Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar”. *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 2 No. 3 (hlm. 17).
- Hariani. (2016). “Metode Penelitian Hukum”. *Jurnal Universitas Medan Area*. (hlm 52).
- Heriyanto. (2021). “PERAN PPNS DAERAH DALAM UPAYA PENEGAKAN PERATURAN DAERAH”. *Jurnal Hukum : HUKMY*. Vol. 1 No. 2 (hlm. 4).
- Kaat. (2019). “LARANGAN DI KAWASAN TANPA ROKOK MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 19 TAHUN 2003 TENTANG PENGAMANAN ROKOK BAGI KESEHATAN”. *Jurnal UNSRAT*, Vol. 7 No. 6. (hlm. 22).

- Loleng. (2021). “Tindak Pidana Ringan Dalam Hukum Pidana Dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Indonesia”. *Jurnal : Lex Crimen*, □ Vol. 10 No. 1 (hlm 10).
- Mardiat. (2021). “IMPLEMENTASI KEWENANGAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM PENEKAKAN PERATURAN DAERAH. *PAJOU (Pakuan Justice Journal Of Law)*. Vol. 2 No. 1. (hlm. 22).
- Masithoh. (2022). “Persepsi Pemerintah Daerah Kabupaten Dan Kota Magelang Terhadap Regulasi Kawasan Tanpa Rokok”. *Jurnal : Promotif Preventif*. Vol. 5 No. 1 (hlm. 146).
- Mathar. (2023). “SANKSI DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN”. *Jurnal : Hukum Keluarga Islam*. Vol. 3 No. 2 (hlm. 46).
- Musrizal. (2020). “PENYELESAIAN TINDAK PIDANA RINGAN MELALUI KOMUNIKASI MEDIASI LEMBAGA ADAT”. *Jurnal : Pusat Jurnal UIN Ar-Raniry*. Vol. 3 No. 2 (hlm. 81).
- Pangestuti. (2021). “PROSEDUR PENYELESAIAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS DALAM KUHP”. *Jurnal Hukum : Yustitiabelen*. Vol. 7 No. 1 (hlm. 76)
- Pramono (2021). “Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Melalui Upaya Non Penal”. *Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum*. Vol. 10 No. 2 (hlm. 78)
- Rahadi. (2017). “PERILAKU PENGGUNA DAN INFORMASI HOAX DI MEDIA SOSIAL”. *Jurnal : Manajemen dan Kewirausahaan*. Vol. 5 No. 1 (hlm. 61).
- Rahman. (2022). “ANTINOMI KEWENANGAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS) DENGAN PENYIDIK POLRI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA TERPADU”. *Jurnal : Hukum dan Dinamika Masyarakat*. Vol. 20 No. 1 (hlm. 27).
- Ramy. (2018). “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelanggaran Merokok Di Kawasan Tanpa Rokok”. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*. Vol. 2 No. 1 (hlm. 8)
- Santoso. (2019). “Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan: Perspektif Pekerjaan Sosial”. *Jurnal : Pengembangan Masyarakat Islam*. Vol. 10 No. 1 (hlm. 40).

- Sardari. (2022). “Peradilan Dan Pengadilan Dalam Konsep Dasar, Perbedaan Dan Dasar Hukum”. *Journal Of Islamic Family Law*. Vol. 1 No. 1 (hlm. 15).
- Sodikin. (2017). “EKSISTENSI PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS) DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN TATA RUANG”. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*. Vol. 6 No. 2 (hlm. 14)
- Suhendi. (2019). “PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM”. *Jurnal TataPamong*. Vol. 1 No. 1 (hlm. 17)
- Susanto. (2019). “Karakter Yuridis Sanksi Hukum Administrasi: Suatu Pendekatan Komparasi”. *Jurnal : UNDIP*. Vol.2 No. 1 (hlm. 128).
- Widada. (2023). “EFEKTIFITAS POLISI PAMONG PRAJA SEBAGAI PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM PENEGAKAN HUKUM PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT”. *Jurnal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*. Vol. 3 No. 3 (hlm. 4).
- Winda, dkk. (2020). “Faktor -Faktor Yang Berhubungan Dengan Perilaku Merokok Pada Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Baiturrahmah Tahun 2015-2016”. *Jurnal : Faculty of Medicine Universitas Baiturrahmah*, Vol. 2 No. 1 (hlm 7-9).
- Wirajaya, dkk. (2022). “TINDAK PIDANA RINGAN MELALUI RESTORATIVE JUSTICE SEBAGAI BENTUK UPAYA PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA”. *Jurnal Kontruksi Hukum*. Vol. 3 No. 3 (hlm 547).
- Zarkasi. (2010). “Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan”. *INOVATIF Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2 No. 4 (hlm. 4).

Skripsi/Tesis/Desertasi

- Engki Wibowo. 2019. *IMPLEMENTASI SANKSI PIDANA BAGI PELANGGAR PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 8 TAHUN 2017*

TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK. SKRIPSI. Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Lampung

Idris Mardi. 2021. *IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR NO 04 TAHUN 2019 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK DI PUSKESMAS LINTAU BUO DAN PUSKESMAS LINTAU BUO UTARA*. SKRIPSI. Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Pekanbaru-Riau

Artikel Dalam Internet

BPS Kab. Buleleng. 2024. Statistik Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2024. Tersedia pada

<https://searchengine.web.bps.go.id/search?mfd=5108&q=wilayah+kabupaten+buleleng&content=all&page=1&title=0&from=all&to=all&sort=relevansi> (diakses tanggal 22 Oktober 2024).

PN Singaraja, 2024. Profil Pengadilan Negeri Singaraja. Tersedia pada <https://www.pn-singaraja.go.id/page/sejarah-pengadilan> (diakses pada 22 Oktober 2024).

Satpol PP Buleleng. 2024. Profil Satpol PP Kabupaten Buleleng. Tersedia pada https://polpp.bulelengkab.go.id/informasi/detail/profil/63_profil-singkat-satpol-pp (diakses tanggal 22 Oktober 2024).

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 3209)

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 50635)

Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Kawasan Tanpa Rokok (Lembaran Daerah Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 2)

Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembar Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 8)

